



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dipecah

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menyusun prioritas perombakan 21 instansi setelah aturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja ditetapkan. Pemecahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan masuk prioritas. "Ada empat instansi yang menjadi prioritas perombakan tahun ini. Sedangkan 17 instansi lainnya akan dibagi dalam dua tahapan prioritas masing-masing delapan dan sembilan instansi," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, Kris Sardjono Sutedjo di Balaikota Timoho

Yogyakarta, Senin (25/1). Keempat instansi yang menempati prioritas utama perombakan adalah Dinas Ketertiban, Dinas Pariwisata, pembentukan Dinas Kebudayaan dan penggabungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Perubahan Dinas Ketertiban merupakan amanah dari undang-undang sehingga harus segera dilakukan. Sedangkan pemecahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan merupakan amanah dari

Gubernur DIY Sri Sultan HB X agar beban kerja instansi sesuai Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta bisa terbagi. Sedangkan penggabungan ULP dengan LPSE perlu dilakukan agar keduanya bisa mandiri, sehingga bisa berkembang dengan lebih baik untuk memberikan layanan pengadaan. "Penggabungan ULP dan LPSE dilakukan karena keduanya akan menjadi percontohan nasional, bahkan sudah ada kesepakatan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk percontohan nasional," katanya.

Rencana perombakan tersebut sudah diajukan ke Pemerintah DIY. Kris optimistis Pemerintah DIY akan menyetujui rencana perombakan tersebut karena dilakukan untuk menjalankan amanah undang-undang dan peraturan lainnya. Sedangkan untuk 17 instansi lainnya akan menunggu hasil pembahasan dasar hukum perombakan yang kini masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016. Sebanyak 17 instansi tersebut di antaranya Dinas Perizinan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Kantor Kesatuan Bangsa, Kantor Keluarga Berencana. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005